IMPLEMENTASI PELAPORAN KEUANGAN DESA TERHADAP TERCAPAINYA PROGRAM KERJA DESA KAWAK TAHUN 2024

Agus Priyanto¹, Nugroho Budi Santoso²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka

Email: ¹priyanto.agues@gamil.com, ²nunooxs@gmail.com

Abstract

Financial reporting is an essential obligation for any party utilizing a budget, whether in government or the private sector. Through financial reports, one can evaluate the achievement of work programs. If the programs are successfully implemented, this will be reflected in the completed financial statements. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, aimed at examining how financial reporting is implemented in relation to the achievement of work programs in Kawak Village in 2024. Financial reporting is one of the indicators of a village's progress and serves as a benchmark to assess whether a program is running effectively. Data collection in this research was conducted through interviews, observation, and documentation to obtain both primary and secondary sources. The findings show that the implementation and administration of financial management in Kawak Village, Pakisaji Sub-district, Jepara Regency, has been effective and aligned with the applicable regulations, specifically Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. This regulation emphasizes key financial management principles, including transparency, accountability, efficiency, and compliance.

This is evidenced by the budget accountability reports prepared by the village treasurer, as well as regular administrative and functional responsibilities carried out as required. As a result, the work programs in the village have been successfully achieved.

Abstrak

Pelaporan keuangan merupakan kewajiban penting bagi setiap pihak yang memanfaatkan anggaran, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Melalui laporan keuangan, seseorang dapat mengevaluasi pencapaian program kerja. Jika program berhasil dilaksanakan, hal ini akan tercermin dalam laporan keuangan yang telah dilengkapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaporan keuangan dilaksanakan dalam kaitannya dengan pencapaian program kerja di Desa Kawak pada tahun 2024. Pelaporan keuangan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu desa dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu program berjalan secara efektif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan sumber primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan dan administrasi pengelolaan keuangan di Desa Kawak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara, telah efektif dan selaras dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Peraturan ini menekankan prinsip-prinsip utama manajemen keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan.

Hal ini dibuktikan dengan laporan akuntabilitas anggaran yang disusun oleh bendahara desa, serta tanggung jawab administrasi dan fungsional rutin yang dilakukan sesuai kebutuhan. Hasilnya, program kerja di desa telah berhasil tercapai.

PENDAHULUAN

Desa Kawak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Desa Kawah memiliki berbagai program kegiatan yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kawak. Demi kelancaran suatu kegiatan, tentunya setiap tahapan kegiatan harus di jabarkan dengan jelas manfaat dan tujuannya sebagai bentuk transparansi, dan evaluasi pemerintah desa. Dengan transparansi dan penjabaran di laporan keuangan akan terlihat apakah program kerjanya tercapai atau tidak (Lyantini & Atmadja, 2023). Didalam pelaksanaan program kegiatan laporan keuangan harus terdapat rincian kegunaan dana atau anggarannya, foto-foto kegiatannya. Seperti contoh program Pembangunan infrastruktur harus ada bukti tampak 0% , 50%, hingga 100% karena kegiatan bersumber dari anggaran yang diberikan oleh anggaran desa. Pelaporan keuangan dan pelaporan kegiatan ini merupakan salah satu dari system penatausahaan keuangan (Akbar, 2023). Pelaporan keuangan ditetapkan oleh pemerintah oleh karena itu semua kegiatan program pemerintah desa harus berjalan sesuai ketentuan yang ada.

Penatausahaan keuangan pada pemerintah desa harus menyerahkan hasil laporan kegiatan dan laporan keuangan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Mardianis Burhan & Syartika, 2018). Jika setiap kegiatan atau program membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur, maka sudah pasti pemerintahan di desa tersebut dapat mencapai visi dan misi yang pemerintah desa. Laporan keuangan yang dihasilkan harusnya mampu untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Faisal et al., 2018). Laporan keuangan adalah bentuk dari pertanggungjawaban mengenai hasil kinerja dalam manajemen keuangan dalam suatu pemerintahan (Sewandono et al., 2021).

Hasil data yang di peroleh dari laporan keuangan akan dimanfaatkan oleh pihak lembaga yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan tersebut. Pemerintah Desa akan menggunakan informasi data keuangan menentukan kebijakan kedepan, yang mana kebijakan tersebut akan berdampak pada efisiensi dan produktifitas serta kemakmuran Desa tersebut. Sumber daya manusia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan hendaknya memiliki keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi agar laporan yang dihasilkan dapat berkualitas dan sistematis sehingga mudah untuk di mengerti (Isbianti et al., 2021).

Berhasil atau tidaknya proses pembangunan pemerintah desa memiliki kaitan erat dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Sumber daya manusia yang diharapkan adalah mampu sesuai dengan kompetensi dalam bidang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program yang sedang dijalankan (Maulana & Napisah, 2021). Sehingga kegiatan dan program pemerintah desa bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang di rencanakan di awal. Apabila sumberdaya manusia tidak kompeten maka akan membuat pemerintah desa tidak berjalan dengan baik dan memunculkan kendala di internal.

Kompetensi seseorang dapat dilihat melalui cara mereka dalam menyelesaikan masalah, ketrampilan serta wawasan yang dimiliki untuk dapat menjalankan dan menyelesaikan program yang telah menjadi tanggungjawab mereka (Susilawati, 2016). Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam mencapai kinerja yang baik. Jika dalam birokrasi terdapat sumber daya manusia dengan kompetensi yang rendah tentu akan sulit untuk dapat menyelesaikan tugas dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini akan menyebabkan pegawai tidak tepat waktu dalam menyelesaikan program yang di embanya. Dengan kompetensi SDM yang tinggi maka akan cepat dan tanggap dalam menjalankan sebuah program serta akan tepat waktu dalam penatausahaan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan tahap awal dari prosedur dalam pengumpulan data sampai pelaporan keuangan dalam penatausahaan keuangan di APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Upaya dari pemerintahan dalam penatausahaan keuangan diharuskan menyusun laporan dengan berdasar pengelolaan atau prosedur akuntansi yang sesuai dengan sistem yang ada di daerah tersebut, sehingga keuangan akan meningkat (Mardianis Burhan & Syartika, 2018). Ada banyak hal yang perlu disayangkan, ternyata tidak semua pegawai di pemerintahan desa dapat memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut. Banyak hasil dari laporan penatausahaan keuangan daerah yang dilaporkan tidak sesuai dengan data yang ada di pemerintah daerah tersebut. Beberapa hasil dari laporan penatausahaan

keuangan di kerjakan tidak sesuai dengan peraturan atau setandar yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun pedoman teknis pelaksanaannya guna memaksimalkan dalam pelaksanaannya (IBRAHIM & MULIATI, 2023). Serta lebih efisien, efektif, akuntabel dan menghindari permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Dengan berjalannya waktu, banyak terjadi perubahan peraturan yang menyebabkan munculnya ketidaksesuaian antara pengelolaan penatausahaan keuangan daerah dengan pedoman pelaksanaannya. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pengertian dari Pengelolaan Keuangan Daerah adalah proses pengelolaan keuangan dari kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan yang artinya segala bentuk pengelolaan keuangan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibawah pengawasan pemerintah pusat.

Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan kegiatan yang sistematis dan terstruktur terkait aliran dana daerah dalam 1 periode anggaran. Pencatatan dan segala macam kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah dan administrasi yang menyebabkan bertambah maupun berkurangnya keuangan adalah tugas dari penatausahaan keuangan. Pencatatan tersebut dapat berupa uang atau barang dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan APBD (Mardianis Burhan & Syartika, 2018). Pengertian menurut KBBI, pembukuan adalah bentuk dari suatu proses mencatat transaksi mulai dari jurnal kemudian ke buku besar.

Hasil dari pembukuan yang telah di catat oleh bendahara kemudian dicatat ulang ke dalam buku atau dokumen. Pentingnya pembukuan bendahara adalah untuk mengetahui dana yang masuk dan keluar agar transparan dalam bertransaksi. Jika pengeluaran telah dilakukan untuk belanja atau hal lain, tugas yang harus dilakukan oleh Bendahara adalah melakukan pengendalian terhadap hal yang seharusnya dilakukan. Adapun informasi yang terdapat dalam pembukuan oleh bendahara pengeluaran antara lain: penggunaan anggaran, aliran data, dan penyajian dokumen elektronik.

Dalam program kerja sendiri, perlu adanya finansial yang mendukung program tersebut yaitu anggaran dana dalam merealisasikan program kerja tersebut. Dalam kegiatan Pembangunan di suatu desa khususnya di desa Kawak, setiap program kerja yang sudah

dilakukan akan membuat pelaporan kegiatan yang di dalamnya memuat tentang capaian, hingga realisasi anggaran yang telah di gunakan dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu kesinambungan antara pelaporan keuangan dengan realisasi program kerja harus nya sama dan terstruktur.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaporan keuangan di desa Kawak secara umum. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana program kerja dari pemerintah desa Kawak apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dari kedua tujuan tersebut maka peneliti ingin melihat bagaimana implementasi dari laporan keuangan terhadap ketercapaian program kerja di desa Kawak. Karena melihat banyak kegiatan dan program kerja yang ada di desa Kawak dan rata-rata ketercapaian program kerjanya masih belum maksimal.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Melihat program kerja di desa-desa terlalu banyak, dan masih ada program kegiatan yang belum berjalan dengan maksimal

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah bagaimana implementasi dari laporan keuangan terhadap ketercapaian program kerja di desa Kawak

Definsi Konsep Variabel

1. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan dan sasaran kegiatan adalah acuan dalam kegiatan apa yang ingin di capai atau target apa yang di inginkan

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan bentuk dukungan yang di berikan terhadap sebuah kegiatan sehingga bisa terlaksana dengan baik, termasuk anggaran maupun sumberdaya manusianya.

3. Mekanisme

Mekanisme adalah alur dalam melaksanakan kegiatan program yang sudah di rencanakan sejak awal, untuk mendukung dan mengarahkan terlaksananya sebuah program kegiatan

Definsi Operasional Variabel

1. Tujuan dan sasaran kegiatan

Tujuan dan sasaran kegiatan diukur dengan tujuan di tulis secara jelas dan dapat dipahami, sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

2. Sumber daya

Sumberdaya dapat di ukur dengan dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan tersedia dan tepat waktu, sumberdaya manusianya apakah ada.

3. Mekanisme

Apakah kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan, apakah ada standar operasional

Hipotesis Penelitian

Terdapat pengaruh antara implementasi program kegiatan yang terdiri dari tujuan kegiatan, sumberdaya, mekanisme terhadap tercapainya program kerja Desa Kawak tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai pelaporan keuangan yang terkait dengan reliasai program kerja yang ada desa di Desa Kawak, dengan cara menganalisis laporan keuangan dengan ketercapaian program kerja. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara pelaksana kegiatan program dan data sekunder dari pelaporan keuangan program yang di jalankan serta analisis dokumentasi.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan penggalian data dari laporan keuangan. Wawancara dilakukan kepada Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran desa, pihak-pihak yang terlibat

dalam pengelolaan anggaran desa, seperti kepala desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh masyarakat, Warga masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Kawak adalah suatu desa yang kaya akan tradisi yang berada di Kecamatan pakisaji kabupaten Jepara. Desa Kawak sesuai dengan namanya, merupakan desa yang menjadi permulaan desa dari desa di kecamatan Pakisaji. Karena istilah nama Kawak, yang berarti lama. Di dalam perumusan kegiatan program di desa Kawak, menurut penuturan petinggi Desa Kawak Bapak Sumanto, ketika awal mulai menjadi Petinggi/kepala desa setelah dilantik, beliau mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dibuat sekali setiap 6 tahun, RPJM Desa adalah fondasi dari semua aktivitas pembangunan di desa. Di dalamnya, visi dan misi desa ditetapkan, mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat desa untuk enam tahun ke depan. Selain itu, RPJM Desa juga berisi arah kebijakan pembangunan, yang akan menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan adanya RPJM Desa, pemerintah desa dan masyarakat memiliki panduan yang jelas tentang arah dan tujuan pembangunan.

Sebagai penjabaran dari RPJM Desa, RKP Desa memfokuskan pada perencanaan tahunan. Dokumen ini menguraikan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, RKP Desa memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan sesuai dengan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur, serta memiliki dampak positif bagi masyarakat. Setelah penyusunan RPJM Desa, dilanjutkan membuat RAPB Desa. RAPB Desa adalah tahap di mana semua rencana diubah menjadi angka. Di sini, pemerintah desa merinci pendapatan dan belanja yang diperkirakan untuk setiap program dan kegiatan. Dengan RAPB Desa, pemerintah desa memiliki alat untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Dokumen ini juga memungkinkan masyarakat untuk melihat dan mengawasi bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan.

Setelah penyusunan RAPBDes, dilanjutkan penetapan menjadi APBDes. APBDes merupakan pengesahan dari RAPBDesa. Setelah melalui serangkaian pembahasan dan persetujuan, RAPBDesa menjadi APBDes, dokumen resmi yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran. Dengan adanya APBDes, semua pihak di desa memiliki kejelasan mengenai bagaimana dana desa akan digunakan dan untuk apa. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam proses pembangunan desa, setiap tahapan perencanaan memiliki peran pentingnya. Dari menetapkan visi dan misi di RPJM Desa, merinci kegiatan di RKP Desa, mengalokasikan anggaran di RAPBDesa, hingga mengelola keuangan dengan APBDes. Setiap langkah idealnya diambil dengan pertimbangan yang mendalam melalui mekanisme musyawarah seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan desa yang maju dan sejahtera.

Setelah melakukan wawancara dengan petinggi, dilakukan juga wawancara dengan Ketua BPD Bapak Rohmat. Beliau juga menyampaikan bahwa setiap program kerja yang telah dirumuskan dan disepakati masuk di APBDes harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa Kawak. Tindaklanjut tersebut mencakup semua kegiatan fisik maupun non fisik yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang disepakati. Setelah dilakukannya observasi, dan cek dokumen pelaporan, peneliti mendapatkan hasil yang dapat menunjukkan adanya kesesuaian antara pelaporan keuangan dengan program kerja. Adanya kesesuaian yang artinya adalah dalam setiap pembukuan dan laporan bendahara mendapatkan hasil yang relevan atau sesuai. Hal ini merujuk pada Permendagri No.77 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan dasar hukum UU no. 6 Tahun 2014 dimana prinsip pengelolaan keuangan meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan. Berikut beberapa hal yang didapatkan setelah melakukan observasi dan cek dokumen keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah. Ketika bendahara melakukan pengajuan untuk penggantian anggaran, hal yang harus dilakukan oleh bendahara adalah menyiapkan LPJ di desa Kawak. Pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran akan disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui ketua bagian keuangan dengan bukti yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban Administratif . Bendahara desa Kawak mempersiapkan LPJ yang kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kemudian Bendahara Pengeluaran

akan melakukan verifikasi atas LPJ yang telah diserahkan. Bendahara Pengeluaran menyerahkan LPJ tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan atau sesuai dengan peraturan. Jika dalam verifikasi tersebut disetujui dan lengkap selanjutnya akan ditandatangani oleh PA. selain secara administratif, ada juga pertanggungjawabans e cara fungsional. Pertanggungjawaban Fungsional dilakukan dengan cara Bendahara desa Kawak melaporkan pertanggungjawaban tidak melebihi dai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dalam Permendagri 77. Pertanggungjawaban akan dilakukan ketika setelah diverifikasi dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran. Kemudian laporan pertanggungjawaban selanjutnya akan diserahkan kepada PPKD.

Secara garis besar pembukuan yang dilakukan oleh bendahara desa Kawak kecamatan pakis aji kabupaten jepara telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwasannya pelaksanaan dan penatausahaan keungan dan pembukuan yang dilakukan oleh bendahara mulai dari penerimaan uang anggaran dari pemerintah telah sesuai dengan Permendagri 77 Th 2020. Hal yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan dalam pembukuan, bendahara desa Kawak telah menggunakan semua dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku di pemerintahan.

Dengan kesesuaian pelaporan pembukuan keuangan desa, berarti juga telah sesuai dengan program kerja desa Kawak. Karena dalam pelaporan keuangan, yang bisa dikeluarkan dalam anggraan adalah anggaran yang sudah amsuk di program kerja pada tahun berjalan tersebut saja. Tidak bisa melakukan belanja diluar anggran yang sudah di tentukan di APBdes. Dalam pelaporan kealisasi anggran di dapatkan bahwa sudah 99,68% realisasi anggaran sudah sesuai dengan APBdes. Hal ini menandakan sudah baik pihak pemerintan Desa Kawak dalam merealisasikan anggaran desa sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh semua stakeholder yang ikut dalam musrenbangdes. Berikut ini merupakan data pendukung mengenai realisasi anggaran yang telah dikeluarkan Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara tahun 2024.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Desa Kawak Tahun 2024

KODE1	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURAN
-------	--------	----------	-----------	--------------

			Rupiah	%	G)
5	BELANJA DAERAH	376.768.000	375.546.611	99,68	1.221.389
51	BELANJA OPERASI	316.065.800	314.844.411	99,61	1.221.389
5101	BELANJA PEGAWAI	75.136.000	75.136.000	100,0 0	0
5101.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	25.960.000	25.960.000	100,0 0	0
	Objektif Lainnya ASN				
5101.03.07	Belanja Honorarium	25.960.000	25.960.000	100,0 0	0
5101.03.07.000	<i>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</i>	<i>25.960.000</i>	<i>25.960.000</i>	<i>100,0</i> <i>0</i>	<i>0</i>
1					
5101.88	Belanja Pegawai PAD	49.176.000	49.176.000	100,0 0	0
5101.88.88	Belanja Pegawai PAD	49.176.000	49.176.000	100,0 0	0
5101.88.88.888	<i>Belanja Pegawai PAD</i>	<i>49.176.000</i>	<i>49.176.000</i>	<i>100,0</i> <i>0</i>	<i>0</i>
8					
5102	BELANJA BARANG DAN JASA	240.929.800	239.708.411	99,49	1.221.389
5102.01	Belanja Barang	35.758.800	34.994.000	97,86	764.800
5102.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.758.800	34.994.000	97,86	764.800

5102.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	189.000	189.000	100,0 0	0
5102.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.760.200	6.758.500	99,97	1.700
5102.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.807.000	3.803.500	99,91	3.500
5102.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15.899.400	15.190.300	95,54	709.100
5102.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000	800.000	100,0 0	0
5102.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.319.600	3.277.500	98,73	42.100
5102.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.945.900	2.942.200	99,87	3.700
5102.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.151.700	1.147.000	99,59	4.700
5102.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	886.000	886.000	100,0 0	0

5102.02	Belanja Jasa	20.089.200	19.732.840	98,23	356.360
5102.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.089.200	19.732.840	98,23	356.360
5102.02.01.005	<i>Belanja Tagihan</i>	<i>5.431.200</i>	<i>5.295.400</i>	<i>97,50</i>	<i>135.800</i>
9	<i>Telepon</i>				
5102.02.01.006	<i>Belanja Tagihan</i>	<i>6.858.000</i>	<i>6.637.440</i>	<i>96,78</i>	<i>220.560</i>
1	<i>Listrik</i>				
5102.02.01.006	<i>Belanja</i>	<i>7.800.000</i>	<i>7.800.000</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
6	<i>Registrasi/Keanggotaan</i>			<i>0</i>	
5102.03	Belanja Pemeliharaan	690.000	690.000	100,0	0
				0	
5102.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	690.000	690.000	100,0	0
				0	
5102.03.02.041	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
1	<i>Komputer-Peralatan</i>			<i>0</i>	
	<i>Komputer-Peralatan</i>				
	<i>Komputer Lainnya</i>				
5102.04	Belana Perjalanan Dinas	560.000	560.000	100,0	0
				0	
5102.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	560.000	560.000	100,0	0
				0	
5102.04.01.000	<i>Belanja Perjalanan</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
5	<i>Dinas Paket Meeting Luar Kota</i>			<i>0</i>	
5102.88	Belanja Barang dan Jasa PAD	183.831.800	183.731.571	99,95	100.229
5102.88.88	Belanja Barang dan Jasa PAD	183.831.800	183.731.571	99,95	100.229
5102.88.88.888	<i>Belanja Barang dan</i>	<i>183.831.800</i>	<i>183.731.571</i>	<i>99,95</i>	<i>100.229</i>

8	<i>Jasa PAD</i>				
52	BELANJA MODAL	60.702.200	60.702.200	100,0 0	0
5202	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	41.350.000	41.350.000	100,0 0	0
5202.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.150.000	8.150.000	100,0 0	0
5202.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.150.000	4.150.000	100,0 0	0
5202.05.02.000 1	<i>Belanja Modal Mebel</i>	<i>4.150.000</i>	<i>4.150.000</i>	<i>100,0</i> <i>0</i>	<i>0</i>
5202.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000	4.000.000	100,0 0	0
5202.05.03.000 7	<i>Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>100,0</i> <i>0</i>	<i>0</i>
5202.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin PAD	33.200.000	33.200.000	100,0 0	0
5202.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin PAD	33.200.000	33.200.000	100,0 0	0
5202.88.88.888 8	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin PAD</i>	<i>33.200.000</i>	<i>33.200.000</i>	<i>100,0</i> <i>0</i>	<i>0</i>
5205	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	19.352.200	19.352.200	100,0 0	0

5205.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya PAD	19.352.200	19.352.200	100,0 0	0
5205.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya PAD	19.352.200	19.352.200	100,0 0	0
5205.88.88.888 8	<i>Belanja Modal Aset</i> <i>Tetap Lainnya PAD</i>	<i>19.352.200</i>	<i>19.352.200</i>	<i>100,0</i> <i>0</i>	<i>0</i>
	SURPLUS / (DEFISIT)	(376.768.00 0)	(375.546.61 1)	99,68	(1.221.389)

Sumber : Realisasi Anggaran Desa Kawak Tahun 2024

Dari laporan realisasi anggaran di atas, kita melihat penyerapan anggaran di desa Kawak sudah mencapai 99,68%, mencakup belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Untuk belanja pegawai realisasi penyerapan anggaran 100%. Disini terlihat ketercapaian dan pemenuhan program kerja sudah berjalan sesuai program, dan realisasinya sudah terpenuhi semuanya. Di dalam belanja barang dan jasa yang meliputi semua barang baik pakai habis, barang jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, maupun jasa PAD ketercapaiannya mencapai 99,49%. Hal ini disebabkan ada beberapa belanja jasa yang tidak terserap anggarannya secara penuh yaitu di belanja jasa, seperti tagihan Listrik, tagihan telepon. Dalam penganggaran jasa Listrik dan telepon, memang sulit sekali mencapai penyerapan yang sempurna. Dikarenakan dalam pemakanain barang jasa tersebut tidak bisa di prediksi hasilnya di tahun 2024 ini di dalam anggaran yang Rp. 20.089.200,- ketercapaian penyerapannya hanya sejumlah Rp, 19.732.840,-. Di dalam realisasi anggaran belanja modal baik itu belanja peralatan dan mesin maupun asset tetap lainnya, penyerapannya sudah mencapai target 100% yaitu dengan jumlah Rp. 60.702.200,-.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

Setelah melakukan penelitian secara langsung hal-hal yang didapati penulis adalah Pelaporan keuangan di desa Kawak sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di desa yang berlaku dan telah di audit oleh Inspektorat Kabupaten Jepara dan dinyatakan

sudah benar sesuai dengan APBdes yang ditetapkan. Pelaksanaan program kerja di desa Kawak, sudah mencapai 99,68% relaisasinya. Hal ini berarti sudah sesuai dengan program yang di rencanakan di musrenbangdes dengan semua stakeholder di desa kawak. Relaisasi yang kurang adalah pembayaran Listrik, yang memang tidak bisa di pastikan dalam penggunaan dana per bulannya.

Terdapat saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian:

Pelaporan keuangan di Desa Kawak telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ada dan hasil audit secara fomal, tetapi pemerintah desa tetap harus meningkatkan system monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan program kegiatan bisa dilihat progresnya walaupun belum selesai sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2023). Peran Informasi Akutansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Pada CV. ADG Medan. *Journal on Education*, 06(01).
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis kinerja keuangan. *KINERJA*. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i1.2444>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2009). Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Akuntansi*.
- IBRAHIM, I., & MULIATI, M. (2023). EFEKTIFITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(3). <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2496>
- Isbianti, P., Arbaatun, L. N., Bintang, E., Nur Cahyaning, D., & Chanabillah, N. (2021). Pendampingan Digitalisasi Arsip Melalui Metode In – On – In untuk Meningkatkan Kemampuan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) dalam Pelestarian Arsip. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i2.43597>
- Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, P. A. dan P. (2018). *Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran*
- Karindra, Nindi. 2023. Strategi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Prinsip Efektivitas pada Pelayanan Pembuatan E-KTP di Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan e-journal unesa*
- KH, F. H. (2013). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Lyantini, N. W. J., & Atmadja, A. T. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS BUMDES SWARNA GIRI DESA BRESELA, KECAMATAN

- PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(3).
<https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.60564>
- Mardianis Burhan, & Syartika, H. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kerinci (The Contribution of Tourism Sector to Local Revenue in Kerinci Regency). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.
<https://doi.org/10.17632/2vtfwntrrg.1>
- Maulana, S. R., & Napisah, L. S. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa dan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15(1).
- Muhammad Angga Kresnadi, A. (2019). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta).
- Muhammad Angga Kresnadi, A. (2019). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta).
- Oktaviany. 2024. Maksimalisasi Penggunaan Aplikasi Digital Dalam Menunjang Administrasi Perangkat Desa Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Journal Of Human and Education (JAHE)*.
- Pangalo, Rotinsulu, Tumangkeng, Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 03 Tahun 2020*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–445. Retrieve
- Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005. Tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta. 2005.
- Prasetya, G. E. (2005). Penyusunan dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: Andi. Pustaka Ramadhan.
- Sewandono, R., Hussein, A. S., SE, Mc., Thoyib, A., & Hadiwidjojo, D. (2021). Efektifitas pengambilan Keputusan Strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. (Studi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara). Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, S. (2016). PENGEMBANGAN EKOWISATA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBERDAYAAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI MASYARAKAT. *Jurnal Geografi Gea*. <https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1690>
- Wahida, F., Animah, A., & Jumaidi, L. T. (2022). Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 20